

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Grasi merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Narapidana atau ahli warisnya kepada Presiden. Grasi merupakan wewenang Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/bentuk dari hukuman itu. Dalam pemberian pengampunan kepada Narapidana, Presiden sebagai Kepala Negara memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pada kasus Schappele Leigh Corby terdapat 3 (tiga) alasan pertimbangan Mahkamah Agung yang menjadi dasar bagi Presiden memberikan Grasi, yaitu :
  - a. Corby mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi oleh psikiater;

- b. Corby hingga saat ini masih merasa tidak bersalah karena Narkotika yang ditemukan adalah disisipkan oleh orang yang tidak dikenali;
- c. Polisi Australia tidak memiliki cacat Corby terkait dengan Narkotika.

Apabila dilihat dari salah satu alasan pemberian Grasi oleh Presiden kepada Corby, yaitu karena ia mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi oleh psikiater, hal itu sangat tidak sesuai dengan keadilan yang ada dalam masyarakat. Setiap orang yang menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan pasti mengalami depresi karena hilang kemerdekaannya. Tidak hanya Corby yang akan mengalami depresi karena menjalankan pidana, narapidana lainnya juga pasti merasakan hal yang sama.

2. Remisi dan Pembebasan bersyarat merupakan hak Narapidana yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan HAM. Dalam pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Narapidana harus memenuhi beberapa syarat antara lain harus berkelakuan baik selama menjalani pidananya di LAPAS dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik. Pada kasus Schappele Leigh Corby yang menjadi dasar pertimbangan Kementrian Hukum dan HAM dalam pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat adalah karena Remisi dan Pembebasan

Bersyarat merupakan hak setiap Narapidana dan ia telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

3. Pemberian Grasi kepada Corby sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi alasan pemberian Grasi kepadanya sangat bertentangan dengan keadilan masyarakat. Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada Corby bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Remisi dan Pembebasan Bersyarat, setelah mengalami pengetatan yaitu narapidana harus mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya, hal itu justru tidak diperhatikan. Sampai dengan Corby memperoleh Pembebasan Bersyarat, ia tetap tidak mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum Indonesia untuk membongkar tindak pidana Narkotika yang ia lakukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberian Grasi khususnya pada pelaku tindak pidana Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara harus lebih di pertimbangkan lagi. Pemerintah harus lebih memperhatikan resiko yang akan terjadi kedepannya, sehingga pemberian Grasi tidak akan membahayakan masyarakat, bangsa dan negara.
2. Dalam pelaksanaan pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat khususnya pada pelaku tindak pidana Narkotika, dihimbau kepada Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM agar syarat-syarat dalam pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang sudah diperketat, sungguh-sungguh diperhatikan. Pemberian Remisi dan Pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika harus diminimalisir sebaik mungkin, sehingga tidak memberikan sinyal positif kepada jaringan Narkotika Internasional bahwa Indonesia adalah Negara yang permisif terhadap kejahatan Narkotika untuk beroperasi di Indonesia.
3. Indonesia sebagai Negara yang sangat menentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika seharusnya benar-benar menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan dari dibentuknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- Ac. Sanoesi HAS, 1976, Pengantar Penologi, Menara, Medan.
- Bambang Purnomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, edisi pertama, Liberty Yogyakarta.
- Dwijaya Priyanto, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Reflika Aditama, Bandung.
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, cet. 3, Stora Grafika Jakarta.
- J.C.T Simorangkir dkk, 2000, Kamus Hukum, Sinar Grafika Jakarta.
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Penerbit Binacipta Bandung.
- Saharjo, 1963, Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung.
- Soedjono, 1977, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, PT. Karya Nusantara Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1970, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Liberty Yogyakarta.
- Utrecht, 1965, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas Surabaya.
- Wahidin, 2000, Pembinaan Narapidana Melalui Pembimbingan Mental dan Penyuluhan Agama, Akademi Ilmu Pemasyarakatan Jakarta.
- Lampiran Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional, bertempat di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2013

### *Website*

<http://hukum.kompasiana.com/2014/02/09/menghitung-masa-pidana-schapelle-leigh-corby-630643.html>

<http://international.sindonews.com/read/2014/02/10/40/834324/ratu-mariyuana-schapelle-corby-saatnya-keluar>

[http://www.waspada.co.id/index.php?option=home\\_content&view=article&id=315864:sby-korbankan-rakyat-demi-ratu-mariyuana&catid=77:fokuredaksi&Itemid=131](http://www.waspada.co.id/index.php?option=home_content&view=article&id=315864:sby-korbankan-rakyat-demi-ratu-mariyuana&catid=77:fokuredaksi&Itemid=131)

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/>

<http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html?m=1>

<http://bnn-dki.com/index.php/aksi/berita-dari-kuningan/pencegahan/511-berbagai-dampak-yang-terjadi-akibat-penyalahgunaan-narkoba>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5-inilah-3-pendapat-ma-yang-dijadikan-dasar-grasi-corby>

<http://nasional.kompas.com/read/2012/05/28/08214525/Grasi.Corby.Berpotensi.Langgar.Sumpah.Presiden>

<http://nasional.kompas.com/read/2012/08/17/15264980/corby.dapat.remisi.6.bulan>

<http://www.antaraneews.com/berita/418257/setelah-bebas-corby-pilih-tinggal-di-villa>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/nikmatnya-corby-setelah-keluar-dari-penjara/dapat-puluhan-miliar-dari-media-yang-mewawancarainya.html>

<http://http://www.merdeka.com/peristiwa/nikmatnya-corby-setelah-keluar-dari-penjara/dapat-280-dolar-australia-dari-biografi.html>

<http://www.suara-islam.com/read/index/9948>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/12/26/063450362/Corby-Disusulkan-Dapat-Remisi-Natal-Ini-Alasannya>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/12/26/063450381/Menteri-Amiri-Tak-Ada->

[Alasan-Corby-Tak-Dapat-Remisi](#)

<http://news.liputan6.com/read/821025/menkumham-bebasnya-corby-bukan->

[kemurahan-hati-pemerintah](#)

<http://www.antaranews.com/berita/406248/legislatur-keputusan-grasi-untuk->

[corby-tidak-tepat](#)

<http://m.merdeka.com/peristiwa/wakil-ketua-dpr-pembebasan-corby-tak-adil-dan->

[merusak-bangsa.html](#)

### ***Peraturan Perundang-undangan***

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan  
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara  
Pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan  
Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21  
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti  
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti  
Bersyarat.